

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON TAHUN 2024



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**
Jl. Tulip No.1 Way Mengaku Telp/Fax (0728) 21158

Halaman 1



*Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
Kabupaten Lampung Barat*

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja (Renja-OPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 digunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024. Rencana Kerja (Renja-OPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat dimaksudkan menjadi pegangan perencanaan dalam rangka menyusun Program dan Kegiatan Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun tersebut dengan biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat.

Semoga Rencana Kerja (Renja-OPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 dapat diimplementasikan secara nyata dalam bentuk program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon. Atas jasa, bantuan dan kerjasama yang baik dari semua pihak dalam penyusunan laporan ini, kami ucapkan terimakasih. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kita semua. Amin

Liwa, 30 Maret 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PEKON



Halaman 2



Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
Kabupaten Lampung Barat

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	19
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	19
2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD	
2.5 Penelahan usulan program dan kegiatan masyarakat	
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	22
3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional	
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	22
3.3 Program, Kegiatan dan Subkegiatan	22
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	25
BAB V PENUTUP	29
Lampiran I	
Lampiran II	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kabupaten Lampung Barat yang merupakan salah satu daerah otonom di Propinsi Lampung harus memiliki program pembangunan yang terpadu yang dilaksanakan secara menyeluruh dalam berbagai aspek kehidupan yang menyentuh masyarakat pada tatanan terbawah. Program pembangunan yang dilaksanakan merupakan perubahan yang mendasar dan mengandung semangat desentralisasi, berpola pada pendekatan wilayah, pendekatan kemasyarakatan dan sosial budaya yang ada dan berkembang di masyarakat. Perubahan mendasar tersebut adalah tuntutan Kabupaten/Kota untuk lebih mampu berperan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagai upaya peningkatan keberdayaan masyarakat dan pemerintahan yang akuntabel perlu dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan secara bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat, agar sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Salah satu upaya untuk mencapainya adalah melalui keterpaduan dan keserasian pembangunan dalam matra perencanaan yang tertata secara baik.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa dimana UU ini dinilai memiliki keberpihakan yang cukup kuat terhadap desa untuk lebih mandiri dan lebih sejahtera. Asas rekognisi

Halaman 4



dan subsidiaritas yang ikut melandasi pengembangan substansi UU Desa merupakan kata kunci penting yang mengandung konsekuensi diberikannya kewenangan yang lebih luas dan alokasi anggaran lebih besar kepada desa guna mendukung kemandirian desa.

Berbagai peluang dan kesempatan menjadi tantangan bagi Pemerintah Desa bersama masyarakatnya, baik dalam memperbaiki sistem, menata kelembagaan desa hingga meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa serta lembaga yang ada di desa. UU Desa setidaknya berisi beberapa kata kunci penting yang membuat desa berbeda dari sebelumnya, baik dilihat dari sisi politik, ekonomi, maupun sosial budaya.

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat serta kebutuhan pembangunan yang telah direncanakan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon akan menjadi salah satu bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 dan Pedoman Penyusunan RAPBD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3452);



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberpa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

Halaman 7



16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005 - 2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010 – 2030;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005 – 2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Sebagai pedoman dan arah bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat dalam melaksanakan tugas

Halaman 8



pokok dan fungsinya pada tahun 2024 mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat.

b. Tujuan

Meningkatkan peran, tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat sebagai unsur pelaksana teknis pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam rangka mendukung tercapainya visi, misi, kebijakan dan program pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan RENJA-OPD Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat ini disusun dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) dan keterkaitan dengan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

Pada bab ini menjelaskan tentang evaluasi pelaksanaan Renja-OPD tahun 2023 dan capaian renstra OPD, analisis kinerja pelayanan OPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, Review terhadap rancangan awal RKPD dan Penelaahan usulan program dan Kegiatan Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Pekon.



BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini menjelaskan tentang Telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) dan program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini menjelaskan tentang rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah tahun 2024.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran

LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra OPD s.d Tahun 2023
- Lampiran 2 : Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Lampung Barat



BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama pada Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2022 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dan subkegiatan dengan jumlah program termasuk program rutin sebanyak 4 (empat) program dan jumlah kegiatan termasuk kegiatan rutin setelah refocusing sebanyak 8 (delapan) kegiatan. Dan jumlah sub kegiatan termasuk sub kegiatan rutin sebanyak 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan Alokasi dana tahun 2022 untuk Belanja Daerah sebesar **Rp 5.098,044.076,-** terealisasi sebesar **Rp 5,023,996,337,-** atau **98,55 %**.

Dari seluruh kegiatan terdapat sebanyak 12 (dua belas) subkegiatan yang realisasi fisik atau kinerja keluarannya tidak dapat mencapai 100 persen yaitu :

1. Sub Kegiatan Penyediaa Gaji dan Tunjangan ASN realisasi* fisik/output sebesar 97,51. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena Kelebihan Anggaran.
2. SubKegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD realisasi* fisik/output sebesar 99.16 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena adanya Sisa Belanja sesuai dengan Rincian belanja sesuai dengan Rincian biaya SPPD



3. SubKegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik realisasi* fisik/output sebesar 62.60 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena Sisa Belanja sesuai dengan Rincian belanja Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
4. Sub Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor Formal realisasi* fisik/output sebesar 98.38 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena adanya Perubahan mengenai rincian Honorarium yang dapat dibayarkan.
5. SubKegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan realisasi* fisik/output sebesar 99.92 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena adanya Sisa Belanja sesuai dengan Rincian Biaya pajak dan perizinan yang dibayarkan.
6. Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya realisasi* fisik/output sebesar 98.04 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena adanya Sisa Belanja sesuai dengan Rincian biaya pemeliharaan Mesin dan lainnya
7. SubKegiatan Fasilitasi sarana dan prasarana desa realisasi* fisik/output sebesar 99.96 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena adanya penataan anggaran karena Kesalahan penggunaan Nomor rekening .
8. SubKegiatan Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa realisasi* fisik/output sebesar 94.75 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena adanya perubahan / pengurangan titik lokasi acara.
9. Kegiatan Pembinaan peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah desa realisasi* fisik/output sebesar 99.60 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena adanya sisa belanja sesuai dengan rincian biaya yang telah dikeluarkan.

Halaman 12



10. SubKegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, pengangkatan dan Pemberhentian Kepala desa realisasi* fisik/output sebesar 99.65 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena adanya perubahan kebutuhan barang dan penyesuaian harga dengan kondisi di lapangan.
11. SubKegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan desa realisasi* fisik/output sebesar 99.91 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena Pagu tidak mencukupi untuk pelaksanaan SPPD Luar Daerah
12. SubKegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat desa realisasi* fisik/output sebesar 99.91 persen. Realisasi fisik/output tidak mencapai 100 persen karena adanya Pagu tidak mencukupi untuk pelaksanaan SPPD Luar Daerah

Rata-rata pencapaian indicator keluaran pada tahun 2022 adalah sebesar 98.55 %.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat dalam melaksanakan program dan kegiatan berhubungan dengan masyarakat dan pemerintahan pekon dan kelurahan, dimana seluruh program dan kegiatannya mengarah kepada masyarakat, pekon dan kelurahan sesuai dengan urusan bidangnya yakni pemberdayaan masyarakat dan desa.

Untuk mengukur sejauh mana sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana kerja Tahun 2022, terlebih dahulu dijelaskan bahwa selain indikator Kinerja Utama yang menjadi dasar atau tolok ukur capaian hasil kinerja, evaluasi kinerja juga menggunakan metode kuantitatif

Halaman 13



berdasarkan data pilihan dari tiap indikator yang relevan dalam mencapai sasaran.

Pada Tahun anggaran 2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon, terjadi perubahan Target dan pagu Kegiatan dikarenakan masih terdampak wabah pandemic Covid-19 di Indonesia. Untuk tahun 2022 terjadi perubahan pada jumlah kegiatan yang semula terdiri dari 7 program dan 46 kegiatan menjadi 4 program dengan 8 kegiatan.

Adapun perkiraan capaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditentukan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

PERKIRAAN PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Tahun 2022
1	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dan tata kelola pemerintahan pekon secara partisipatif	Persentase Desa mandiri	11.45%



Persentase Pekon dengan Status Mandiri

= $\frac{\text{Jumlah Pekon Mandiri}}{\text{Jumlah Pekon}} \times 100\%$

Jumlah Pekon

= $\frac{15}{131} \times 100\%$

131

= 11,45%

Hasil perhitungan Indeks Desa Membangun (IDM) lampung Barat 2022

Pencapaian Sasaran indikator kinerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Indikator I :

NO	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase pekon dengan status mandiri	11.45%	35.9%	313.53%

Capaian Kinerja pada Tahun 2022 capaian Realisasi Melebihi Target yang direncanakan

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Isu-isu strategis yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari gambaran pelayanan OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon adalah sebagai berikut :

1. Memberdayakan dan memfungsikan sumberdaya aparatur pemerintahan serta peningkatan Pekon/Kelurahan;
2. Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur pemerintahan Pekon/Kelurahan.
3. Mendorong pengembangan pengetahuan dan keterampilan di bidang Teknologi Tepat Guna (TTG).
4. Mendorong pembangunan sarana dan prasarana pekon tertinggal.
5. Mendorong masyarakat miskin dengan menumbuhkan usaha ekonomi produktif.



6. Peningkatan kualitas para pejabat di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon.
7. Mendorong tumbuhnya semangat swadaya gotong royong bagi masyarakat dan Pemerintahan Pekon.
8. Mensosialisasikan kelestarian alam dan lingkungan hidup.
9. Melengkapi sarana dan prasarana kantor.
10. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana desa memiliki kewenangan guna mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya
11. Berakhirnya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) pada Tahun 2015.
12. Perlu adanya Tim Pendamping Desa yang bertugas mengawal dan membantu pihak desa yang menerima Dana Desa terkait alokasi dan pertanggungjawaban administratif dana tersebut

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu-isu penting yang menjadi **masalah-masalah mendesak** yaitu antara lain :

1. Masih kurangnya Tenaga Pengelola kegiatan dan Administrasi Keuangan yang bersertifikat.
3. Kapasitas pengendalian dan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon belum optimal.
4. Masihnya rendahnya kualitas Pokjanal Posyandu Kecamatan/Pekon/Kelurahan dan Kader Posyandu.
6. Keterisoliran pekon dan pemanfaatan kawasan potensial.
7. Berkurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam membangun Desa/Pekon/Kelurahan.
8. Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) sebagai upaya meningkatkan hasil karya TTG di wilayah Kabupaten.
9. Pengentasan Kemiskinan.

Halaman 16



10. Sarana dan Prasarana Pekon/kelurahan yang belum memadai
11. Penertiban Daerah Otonomi Baru (Desa/Pekon)
12. Pengelolaan Keuangan Pekon yang belum maksimal dalam tertib administrasinya.
13. Pembinaan, pengembangan dan perkuatan desa, administrasi dan kelembagaan desa secara bertahap terus dilaksanakan.
14. Kelembagaan Kemasyarakatan di Pekon/Kelurahan yang belum optimal.
15. Kualitas Aparatur Pemerintahan Pekon/Kelurahan masih perlu ditingkatkan.
16. Pendataan dan Pemutakhiran Profil Pekon setiap tahun di up Date.
17. Administrasi Pemerintahan Pekon/Kelurahan yang belum maksimal.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon mempunyai **tantangan** dalam melaksanakan tupoksi, Adapun tantangan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon adalah :

1. Masih banyaknya Pekon Mandiri;
2. Menurunnya semangat swadaya gotong royong masyarakat;
3. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam Pemanfaatan TTG dan SDA;
4. Rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengelola bantuan.
5. Kurangnya kapasitas pegawai baik jumlah maupun kualitas.

Sedangkan **peluang** yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon adalah :

1. Adanya kesadaran/partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
2. Potensi SDA yang belum dikembangkan.
3. Lembaga Masyarakat yang semakin baik.
4. Meningkatnya mobilitas informasi.

Halaman 17



5. Adanya pegawai yang mengisi formasi jabatan.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dilihat dari Rencana Program dan Kegiatan yang ada di Rancangan awal RKPD sudah sesuai dan selaras dengan Program Kegiatan yang ada di Rancangan awal Renja 2022, adapun Program dan Kegiatan yang tercantum dalam Rancangan Awal RKPD dan Rancangan Awal Renja adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - e) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - f) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - g) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD



- d) Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - e) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - f) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas operasional
 - b) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c) Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENATAAN DESA

Halaman 19



- a. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa
 - 1) Sub Kegiatan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa
 - 2) Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa
 - 3) Sub Kegiatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa
- 3. PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA
 - a. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa
 - 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
 - 2) Sub Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
- 4. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
 - a. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
 - 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
 - 2) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
 - 3) Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
 - 4) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
 - 5) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
 - 6) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
 - 7) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
 - 8) Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
 - 9) Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
- 5. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT



- a. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
 - 2) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
 - 3) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
 - 4) Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
 - 5) Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
 - 6) Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Nihil



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Untuk tahun 2024 belum ada kebijakan kebijakan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon yang akan dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke			
				2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dan tata kelola pemerintahan pekon secara partisipatif	Persentase Desa mandiri	37,40 %	39,69 %	41,22 %	42,75 %

3.3 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN

Berdasarkan Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat, maka akan dilaksanakan kegiatan – kegiatan sebagai berikut :



1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - 6) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 7) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - 4) Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
 - c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Halaman 23



- 4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 5) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas operasional
 - 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. PROGRAM PENATAAN DESA
- a. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa
- 1) Sub Kegiatan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa
 - 2) Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa
 - 3) Sub Kegiatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa
3. PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA
- a. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa
- 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan



4. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

a. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

- 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
- 2) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
- 3) Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
- 4) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
- 5) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
- 6) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
- 7) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
- 8) Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
- 9) Sub Kegiatan Fasilitasi Penetapan dan penegasan Batas Desa
- 10) Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

5. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

a. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan

Halaman 25



Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

- 2) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- 3) Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- 4) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
- 5) Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
- 6) Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
- 7) Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa
- 8) Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka pelaksanaan program kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat Tahun anggaran 2024 semestinya dapat dilakukan melalui beberapa sumber pembiayaan antara lain APBN, APBD Provinsi Lampung maupun APBD Kabupaten Lampung Barat.

Pada tahun 2024 sumber pembiayaan program kegiatan DPMP Kabupaten Lampung Barat hanya melalui APBD Kabupaten Lampung Barat sedangkan dari dana APBN maupun APBD Provinsi Lampung belum mendapat alokasi bantuan dana.

NO	PROGRAM	PAGU (Rp)	TARGET
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.496.778.800	100%
2	Program Penataan Desa	1.878.060.300	100%
3	Program Peningkatan Kerjasama Desa	240.145.000	100%
4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	1.798.565.200	100%
5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1.569.106.800	100%



Adapun anggaran belanja langsung tersebut dipergunakan untuk pembiayaan program, kegiatan, Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN, dengan jumlah anggaran Rp 3.496.778.800,- terdiri atas 6 kegiatan dan 24 Sub kegiatan yaitu
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - 6) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 7) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - 4) Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
 - c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Halaman 28



- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 5) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas operasional
 - 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. PROGRAM PENATAAN DESA dengan jumlah anggaran Rp 1.878.060.300 terdiri atas 1 kegiatan dan 3 Sub kegiatan yaitu
- a. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa
 - 1) Sub Kegiatan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa
 - 2) Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa



- 3) Sub Kegiatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa
3. PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA dengan jumlah anggaran Rp 240.145.000 terdiri atas 1 kegiatan dan 1 Sub kegiatan yaitu
- a. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa
- 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
4. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA dengan jumlah anggaran Rp 1.798.565.200 terdiri atas 1 kegiatan dan 9 Sub kegiatan yaitu
- a. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
- 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
- 2) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
- 3) Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
- 4) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
- 5) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
- 6) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
- 7) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
- 8) Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
- 9) Sub Kegiatan Fasilitasi Penetapan dan penegasan Batas Desa
- 10) Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
5. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT dengan jumlah anggaran Rp 1.569.106.800 terdiri atas 1 kegiatan dan 6 Sub kegiatan yaitu

Halaman 30



- a. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
 - 2) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
 - 3) Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
 - 4) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
 - 5) Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
 - 6) Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
 - 7) Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa
 - 8) Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.



BAB V

PENUTUP

Untuk mewujudkan pembangunan daerah yang terarah, terukur dan berkelanjutan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon telah berupaya memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia seoptimal mungkin.

Dengan disusunnya Rencana Kerja (RENJA - OPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 ini, diharapkan agar pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon untuk tahun 2024 sesuai dengan target kinerja yang direncanakan.

Rencana kerja ini merupakan dokumen perencanaan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat di tahun 2024.

Liwa, 30 Maret 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PEKON



Dis. SYAEKHUDDIN, MM
NIP. 19680913 198909 1 002

Halaman 32



LAMPIRAN 1

Rekapitan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Lampung Barat

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Subkegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPD pada tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2023)		Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPKD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2023 (%)		Ket	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		100%		100%	3,328,555,700	100%	3,328,555,700	100%	3,328,555,700	100%	3,328,555,700	100%	3,328,555,700	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa
		URUSA PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		100%	679,871,755,479	100%	2,427,354,800	100%	2,427,354,800	100%	2,427,354,800	100%	2,427,354,800	100%	2,427,354,800	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa
2.13.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Jumlah Bidang Urusan yang Dilaksanakan	28 Dokumen	5,536,150,557	28 Dokumen	2,427,354,800	28 Dokumen	2,427,354,800	28 Dokumen	2,427,354,800	28 Dokumen	2,427,354,800	28 Dokumen	2,427,354,800	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa
2.13.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	48 Dokumen 65 Laporan	48,813,021	6 Dokumen 13 Laporan	33,664,000	6 Dokumen 13 Laporan	33,664,000	6 Dokumen 13 Laporan	33,664,000	6 Dokumen 13 Laporan	33,664,000	6 Dokumen 13 Laporan	33,664,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa
2.13.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	38 Dokumen	6,121,522	2 Dokumen	4,999,900	2 Dokumen	4,999,900	2 Dokumen	4,999,900	2 Dokumen	4,999,900	2 Dokumen	4,999,900	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa
2.13.01.2.01.02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	5,483,136	1 Dokumen	6,825,100	1 Dokumen	6,825,100	1 Dokumen	6,825,100	1 Dokumen	6,825,100	1 Dokumen	6,825,100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa
2.13.01.2.01.03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	5,483,136	1 Dokumen	5,725,100	1 Dokumen	5,725,100	1 Dokumen	5,725,100	1 Dokumen	5,725,100	1 Dokumen	5,725,100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa
2.13.01.2.01.04		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	5,483,136	1 Dokumen	3,764,900	1 Dokumen	3,764,900	1 Dokumen	3,764,900	1 Dokumen	3,764,900	1 Dokumen	3,764,900	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa
2.13.01.2.01.05		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Dokumen Perubahan	5 Dokumen	5,483,136	1 Dokumen	5,050,000	1 Dokumen	5,050,000	1 Dokumen	5,050,000	1 Dokumen	5,050,000	1 Dokumen	5,050,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa
2.13.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan hasil Koordinasi	1 Laporan	1,843,452	1 Laporan	2,299,000	1 Laporan	2,299,000	1 Laporan	2,299,000	1 Laporan	2,299,000	1 Laporan	2,299,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa
2.13.01.2.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	18,915,504	12 Laporan	5,000,000	12 Laporan	5,000,000	12 Laporan	5,000,000	12 Laporan	5,000,000	12 Laporan	5,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa
2.13.01.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima gaji dan Tunjangan ASN	10 Dokumen 15 Laporan	4,161,487,680	27 Orang/Bulan	2,036,970,100	27 Orang/Bulan	2,036,970,100	27 Orang/Bulan	2,036,970,100	27 Orang/Bulan	2,036,970,100	27 Orang/Bulan	2,036,970,100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa
2.13.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangannya	135 Orang/Bulan	4,146,621,126	26 Orang/Bulan	2,029,460,100	26 Orang/Bulan	2,029,460,100	26 Orang/Bulan	2,029,460,100	26 Orang/Bulan	2,029,460,100	26 Orang/Bulan	2,029,460,100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa
2.13.01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan hasil Koordinasi	5 Laporan	6,121,522	4 Laporan	3,110,000	4 Laporan	3,110,000	4 Laporan	3,110,000	4 Laporan	3,110,000	4 Laporan	3,110,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa
2.13.01.2.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	10 Laporan	5,247,019	1 Laporan	1,890,000	1 Laporan	1,890,000	1 Laporan	1,890,000	1 Laporan	1,890,000	1 Laporan	1,890,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa
2.13.01.2.02.08		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10 Dokumen	3,498,013	2 Dokumen	2,510,000	2 Dokumen	2,510,000	2 Dokumen	2,510,000	2 Dokumen	2,510,000	2 Dokumen	2,510,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa
2.13.01.05		Administrasi Kepagawainan Perangkat Daerah	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	10 Dokumen	17,490,063	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa
2.13.01.02.05.09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan	10 Dokumen	17,490,063											Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa
2.13.01.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Koantor yang disediakan	120 Paket, 20 Dokumen, 120 Laporan	427,843,092	8 Paket	111,949,600	8 Paket	111,949,600	8 Paket	111,949,600	8 Paket	111,949,600	8 Paket	111,949,600	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa
2.13.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Instalasi Listrik/Bangunan kantor yang disediakan	40 Paket	9,215,515	1 Paket	3,149,000	1 Paket	3,149,000	1 Paket	3,149,000	1 Paket	3,149,000	1 Paket	3,149,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa
2.13.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	35 Paket	123,958,500											Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa
2.13.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	45 Paket	74,359,001	9 Paket	31,846,600	9 Paket	31,846,600	9 Paket	31,846,600	9 Paket	31,846,600	9 Paket	31,846,600	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa

2.13.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	20 Dokumen	6,926,065	4 Dokumen	5,010,000	4 Dokumen	5,010,000	4 Dokumen	5,010,000	4 Dokumen	5,010,000	4 Dokumen	5,010,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	Liwa
2.13.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Bulan Fasilitas Kunjungan Tamu Perbulan	60 Laporan	11,060,716	12 Laporan	5,355,000	12 Laporan	5,355,000	12 Laporan	5,355,000	12 Laporan	5,355,000	12 Laporan	5,355,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	Liwa
2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	202,323,295	12 Laporan	66,589,000	12 Laporan	66,589,000	12 Laporan	66,589,000	12 Laporan	66,589,000	12 Laporan	66,589,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	Liwa
2.13.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	3010 Laporan	323,668,123	2 Laporan	130,736,100	2 Laporan	130,736,100	2 Laporan	130,736,100	2 Laporan	130,736,100	2 Laporan	130,736,100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	Liwa
2.13.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2970 Laporan	6,296,423	1Laporan	6,440,000	1Laporan	6,440,000	1Laporan	6,440,000	1Laporan	6,440,000	1Laporan	6,440,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	Liwa
2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya	20 Laporan	54,696,673	1 Laporan	19,250,000	1 Laporan	19,250,000	1 Laporan	19,250,000	1 Laporan	19,250,000	1 Laporan	19,250,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	Liwa
2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	20 Laporan	262,675,028	1 Laporan	105,046,100	1 Laporan	105,046,100	1 Laporan	105,046,100	1 Laporan	105,046,100	1 Laporan	105,046,100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	Liwa
2.13.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dipelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah yang di adakan	110 Unit	556,848,579	12 Unit	114,035,000	12 Unit	114,035,000	12 Unit	114,035,000	12 Unit	114,035,000	12 Unit	114,035,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa
2.13.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara dan dibayar pajaknya	45 Unit	314,987,630	9 Unit	91,250,000	9 Unit	91,250,000	9 Unit	91,250,000	9 Unit	91,250,000	9 Unit	91,250,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa
2.13.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	60 Unit	13,729,699	12 Unit	5,190,000	12 Unit	5,190,000	12 Unit	5,190,000	12 Unit	5,190,000	12 Unit	5,190,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	Liwa
2.13.01.2.09.11	Pemeliharaan Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Banguna Lainnya	Jumlah Yunit Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	5 Unit	228,131,250	1 Unit	17,595,000	1 Unit	17,595,000	1 Unit	17,595,000	1 Unit	17,595,000	1 Unit	17,595,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang memenuhi syarat penataan desa yang ditata	100%	1,847,402,269	100%	307,070,000	100%	307,070,000	100%	307,070,000	100%	307,070,000	100%	307,070,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	Liwa
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan	1330 Pekon, 10 Unit	1,847,402,269	131 Pekon	307,070,000	131 Pekon	307,070,000	131 Pekon	307,070,000	131 Pekon	307,070,000	131 Pekon	307,070,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	Liwa
2.13.02.2.01.01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan perubahan Status Desa	Jumlah Desa Yang melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Status Desa	665 Pekon	182,651,764											Dinas Pemberdayaan Masyarakat	Liwa
2.13.02.2.01.03	Fasilitas Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa Yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	665 Pekon	368,857,023											Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa
2.13.02.2.01.06	Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	10 Unit	1,295,893,482	2 Unit	307,070,000	2 Unit	307,070,000	2 Unit	307,070,000	2 Unit	307,070,000	2 Unit	307,070,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	Liwa
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Peningkatan Kerjasama Antar Pekon Untuk Meningkatkan Ekonomi	2,29%	318,560,957	2,29%	39,459,000	2,29%	39,459,000	2,29%	39,459,000	2,29%	39,459,000	2,29%	39,459,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	Liwa
2.13.03.2.01	Fasilitas Kerja sama Antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan perdesaan	5 Dokumen	318,560,957		39,459,000		39,459,000		39,459,000		39,459,000		39,459,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa
2.13.03.2.01.03	Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan perdesaan	5 Dokumen	318,560,957	1 Dokumen	39,459,000	1 Dokumen	39,459,000	1 Dokumen	39,459,000	1 Dokumen	39,459,000	1 Dokumen	39,459,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pekon Tertib Administrasi	100%	606,316,820,315	100%	317,282,400	100%	317,282,400	100%	317,282,400	100%	317,282,400	100%	317,282,400	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	Liwa
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan Pembangunan Desa	3280 Dokumen, 71265 Orang, 50 Pekon, 5 Laporan	606,316,820,315	393 Dokumen	317,282,400	393 Dokumen	317,282,400	393 Dokumen	317,282,400	393 Dokumen	317,282,400	393 Dokumen	317,282,400	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa
2.13.04.2.01.03	Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan Pembangunan Desa	1965 Dokumen	365,056,387	2 Dokumen	61,030,500	2 Dokumen	61,030,500	2 Dokumen	61,030,500	2 Dokumen	61,030,500	2 Dokumen	61,030,500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	Liwa
2.13.04.2.01.04	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Keuangan Desa	10 Dokumen	121,606,123	2 Dokumen	79,958,000	2 Dokumen	79,958,000	2 Dokumen	79,958,000	2 Dokumen	79,958,000	2 Dokumen	79,958,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	Liwa
2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa yang mengikuti Pembinaan peningkatan Kapasitas	Jumlah Aparatur pemerintahan Desa yang mengikuti Pembinaan peningkatan Kapasitas	70740 Orang	308,993,892	60 Orang	79,168,500	60 Orang	79,168,500	60 Orang	79,168,500	60 Orang	79,168,500	60 Orang	79,168,500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	Liwa
2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDes dan lembaga Kerja sama Antar Desa (kerjasama antar desa)	Jumlah Dokumen Hasil pembinaan dan Pemberdayaan BUMDes dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa	5 Dokumen	297,331,063	131 Pekon	47,125,500	131 Pekon	47,125,500	131 Pekon	47,125,500	131 Pekon	47,125,500	131 Pekon	47,125,500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa

2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil penyelenggaraan pemilihan Pengangkat dan pemberhentian Kepala Desa	5 Laporan	2,150,280,374													Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa
2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	630 Dokumen	368,107,261,940													Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa
2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	655 Dokumen	175,094,840,740													Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa
2.13.04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan peningkatan Kapasitas	525 Orang	299,545,457													Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa
2.13.04.2.01.15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang dipasilitasi dalam penetapan dan penegasan Batas desa	50 Pekon	199,986,089													Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	5 Dokumen	59,371,918,250	1 Dokumen	49,999,900	1 Dokumen	49,999,900	1 Dokumen	49,999,900	1 Dokumen	49,999,900	1 Dokumen	49,999,900	1 Dokumen	49,999,900	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Kelembagaan Kemasyarakatan Pekon Aktif	75%	65,852,821,382	60%	237,389,500	60%	237,389,500	60%	237,389,500	60%	237,389,500	60%	237,389,500	60%	237,389,500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM, dan Karang taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Unit, 4 Lembaga, 25 Dokumen, 10 Laporan	65,852,821,382	4 Lembaga	237,389,500.00	4 Lembaga	237,389,500.00	4 Lembaga	237,389,500.00	4 Lembaga	237,389,500.00	4 Lembaga	237,389,500.00	4 Lembaga	237,389,500.00		
2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Fasilitasi terkait penataan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna	10 Dokumen	22,345,903,850													Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (Rt,Rw,PKK,Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon)	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PKK, Posyandu,LPM, dan Karang Taruna	20 Lembaga	41,864,669,863													Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa
2.13.05.2.01.04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasaran Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Fasilitasi terkait pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa	5 Unit	256,507,736													Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa
2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Eknomi Masyarakat dan pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Fasilitasi pembinaan pelaksanaan TTG bagi pemerintah desa dan masyarakat pekon	5 Dokumen	216,368,042													Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Fasilitasi Pelaksanaan Gotong Royong Masyarakat dan Peringatan BBGRM	5 Laporan	225,074,291	1 Laporan	49,990,000	1 Laporan	49,990,000	1 Laporan	49,990,000	1 Laporan	49,990,000	1 Laporan	49,990,000	1 Laporan	49,990,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa
2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	5 Laporan	183,478,360	1 Laporan	84,515,000	1 Laporan	84,515,000	1 Laporan	84,515,000	1 Laporan	84,515,000	1 Laporan	84,515,000	1 Laporan	84,515,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa
2.13.05.2.01.08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Keterbiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman,Keterbiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	5 Dokumen	132,906,225													Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa

	2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	5 Dokumen	627,913,015	1 Dokumen	102,884,500	1 Dokumen	102,884,500	1 Dokumen	102,884,500	1 Dokumen	102,884,500	1 Dokumen	102,884,500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Liwa
							3,328,555,700		3,328,555,700		3,328,555,700		3,328,555,700		3,328,555,700		

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN PEKON KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						8.982.656.100,00							50.100.319.539,75	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						8.982.656.100,00							50.100.319.539,75	
1.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas PMP (%)				80.00	3.496.778.800,00				2. Meningkat kan kualitas Sumberdaya Manusia			4.710.130.433,75	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat daerah (Dokumen)				8	45.503.600,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)			2. Meningkat kan kualitas Sumberdaya Manusia		11	52.224.202,50	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon
	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		25.00	11.00	8.00	4.347.000,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)					11.00	4.952.762,50	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon
	2.13.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		1	1	1	7.850.000,00	(BALIK BUKIT, Balik Bukit)					1	9.026.062,50	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon
	2.13.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		1	1	1	6.583.600,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)					1	7.571.312,50	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon
	2.13.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		1	1	1	4.379.600,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)					1	4.979.212,50	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon
	2.13.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						5.807.600,00							6.678.625,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		1	1	1	2.643.600,00	(BALIK BUKIT, Balik Bukit)					1	6.678.625,00	
	2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		4	1	1	13.892.200,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)					1	3.040.427,50	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		12	12	12		(Balik Bukit, Balik Bukit)					12	15.975.800,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.735.107.100,00							3.615.689.475,75	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.726.470.700,00							3.605.757.500,75	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon
	2.13.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		31	27	26	3.576.200,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)					27	3.605.757.500,75	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon
	2.13.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		4	4	4	2.173.600,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)					4	4.112.975,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon
	2.13.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		1	1	1	2.886.600,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)					1	2.499.525,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon
	2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						11.500.000,00							3.319.475,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon
	2.13.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		2	2	2		(Balik Bukit, Balik Bukit)					2	3.319.475,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon
								11.500.000,00							13.225.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon
								11.500.000,00							13.225.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)</i>		2	2	3		(Balik Bukit, Balik Bukit)					2	13.225.000,00	
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						377.766.300,00							434.921.317,50	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)</i>		10	8.00	8.00	3.621.800,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)					8.00	4.165.875,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)</i>		0	7	7	113.294.000,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)					7	129.993.815,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)</i>		9	9	9	52.319.000,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)					9	60.167.137,50	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon
	2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)</i>		4	4	4	5.760.000,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)					4	6.625.725,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon
	2.13.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)</i>		12	12	12	8.797.500,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)					12	10.117.125,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)</i>		12	12	12	193.974.000,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)					12	223.851.640,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						159.425.400,00							270.859.109,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon
	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)</i>		1	1	1	5.000.000,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)					1	8.516.900,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						31.210.000,00							41.275.225,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		1	1	1		(Balik Bukit, Balik Bukit)					1	41.275.225,00	
								123.215.400,00							221.066.984,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		1	1	1		(Balik Bukit, Balik Bukit)					1	221.066.984,00	
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						167.476.400,00							323.211.329,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon
	2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						91.250.000,00							246.587.002,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		9	9	9		(Balik Bukit, Balik Bukit)					9	246.587.002,00	
	2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						7.875.000,00							10.117.125,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		12	12	12		(Balik Bukit, Balik Bukit)					12	10.117.125,00	
	2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						68.351.400,00							66.507.202,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		1	1	1		(Balik Bukit, Balik Bukit)					1	66.507.202,00	
2.	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA						1.878.060.300,00				2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			28.417.179.075,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon
			Persentase Desa yang Memenuhi syarat Penataan Desa yang ditata (%)				100									
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa						1.878.060.300,00				2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia			28.417.179.075,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon
			Jumlah Desa yang melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa (Desa)				131		(Balik Bukit, Balik Bukit)					131		
	2.13.02.2.01.0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa						138.111.000,00							15.882.762.125,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.02.2.01.0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa (Desa)		131.00	131.00	131.00		(Balik Bukit, Balik Bukit)					131.00	15.882.762.125,00	
	2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya (Desa)		0	131	131	110.067.700,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)					131	1.265.777.975,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon
	2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi (Unit)		1	2	1	1.629.881.600,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)					1	11.268.638.975,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon
3.	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Meningkatan Kerjasama Antar Pekon Untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (%)				2.29	240.145.000,00				2. Meningkatkan kualitas Sumberda ya Manusia			-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan perdesaan (Dokumen)				1	240.145.000,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)					1	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon
	2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen)		0	0		240.145.000,00							-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon
4.	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase pekon Tertib Administrasi (%)				100	1.798.565.200,00							6.984.299.781,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa						1.798.565.200,00							6.984.299.781,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon
	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen)		131	393	393	138.220.200,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)					393	3.174.403.363,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa						84.424.000,00							105.744.455,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)		1	2	2		(Balik Bukit, Balik Bukit)					2	105.744.455,00	
	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)		60	393	393	232.904.000,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)					393	268.690.341,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon
	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (Dokumen)		1	1	1	132.348.600,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)					1	142.650.140,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon
	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Laporan)		131	1	1	40.374.000,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)					1	1.869.809.021,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon
	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun (Dokumen)		408	136	136	242.036.500,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)					136	320.093.271,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon
	2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa (Dokumen)		131	131	131	131.146.500,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)					131	152.256.383,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon
	2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)		262	105	105	196.956.000,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)					105	260.474.310,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Desa)		0	10	10	151.218.200,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)					10	173.900.947,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)		3	1	1	448.937.200,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)					1	516.277.550,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	<i>Persentase Kelembagaan Kemasyarakatan Pekon Aktif (Desa)</i>				131	1.569.106.800,00				2. Meningkat kan kualitas Sumberda ya Manusia			9.988.710.250,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota						1.569.106.800,00							9.988.710.250,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)</i>		2	2	2	168.962.600,00		(Balik Bukit, Balik Bukit)				2	194.306.990,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)</i>		1	4	4	168.962.600,00		(Balik Bukit, Balik Bukit)				4	3.640.406.075,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon
	2.13.05.2.01.0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Unit)</i>		0	1	1	191.706.700,00		(Balik Bukit, Balik Bukit)				1	223.050.205,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)</i>		0	0		163.605.300,00							-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)</i>		3	1	1	161.853.500,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)					1	195.716.775,00 195.716.775,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon
	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Laporan)</i>		12	1	1	138.736.000,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)					1	159.546.400,00 159.546.400,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon
	2.13.05.2.01.0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa (Dokumen)</i>		0	1	1	100.496.200,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)					1	115.570.630,00 115.570.630,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)</i>		4	1	1	474.783.900,00	(Balik Bukit, Balik Bukit)					1	5.460.113.175,00 5.460.113.175,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon
J U M L A H								8.982.656.100,00							50.100.319.539,75	